

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran-On line 2

Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi



E-Learning

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2018**

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami betapa pentingnya pembelajaran Pendidikan Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi agar memperoleh pengetahuan (*knowledge*) nilai-nilai Pancasila, visi-misi serta tantangan pengamalannya yang dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) nyata sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasilais.

Modul kedua ini merupakan lanjutan dari modul pertama. Pada modul pertama, telah disajikan dalam pembelajaran *on line* pertama tentang pengantar Pendidikan Pancasila, dengan sub pokok bahasan pendahuluan, dasar hukum, visi-misi, tujuan umum dan tujuan khusus, nilai-nilai Pancasila, serta dinamika dan pentingnya pembelajaran Pendidikan Pancasila. Tibalah saatnya pada pertemuan pembelajaran *on line* kedua, materi yang akan disajikan adalah tentang tantangan penerapan Nilai-Nilai Pancasila, yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, sampai pada tantangan revolusi dunia 4.0 yang tidak dapat dihindarkan lagi oleh bangsa Indonesia.

TANTANGAN PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

Diawali dengan dinamika perubahan dalam era reformasi, yang berihktikad untuk melakukan perbaikan dan pembangunan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang. Bangsa Indonesia sangat berharap terjadi transformasi nilai-nilai Pancasila yang benar-benar dapat mencerminkan identitas dan integritas bangsa Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan tercipta rasa kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sekelumit harapan masyarakat yang dialamatkan dipundak reformasi di Indonesia. Pada awal reformasi di cabut MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4, yang telah menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Serta sudah diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor

II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), maka terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun pencabutan itu Penataran P-4 sebagai salah satu bentuk metode dan teknik pembelajaran nilai-nilai Pancasila sudah tidak boleh lagi dilaksanakan. Kemudian diperkuat dengan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan pengutan untuk kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Menurut (Ristek Dikti. 2106 : 35) Hasil survey Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari.

Konsekwensi logis dari ketentuan ketetapan MPR dan UU RI Nomor 20 tahun 2003 tersebut, maka nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi dasar negara, ideologi negara dan sistem filsafat, sebagai pandangan hidup bangsa, keberadaannya semenjak reformasi sangat menyedihkan, diabaikan dan hampir ditinggalkan. Hampir tidak pengkajian, tidak ada pendalaman dan tidak dikembangkan secara sistematis, komprehensif serta berkelanjutan, oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berkopemten dalam mentransformasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Akibat yang nyata adalah terjadinya penurunan pemahaman pengetahuan tentang ideologi Pancasila, dan tergerusnya mentalitas bangsa yang berdampak pada maraknya sikap dan perilaku intoleransi, pergaulan bebas dan tumbuh subur profesi Perempuan Pekerja Seksual, korupsi, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, kekerasan perempuan dan anak, konflik sosial horizontal dan vertikal, kriminalitas begal dan perampokan sadis, tindakan anarkis, sparatis dan kekerasan bersenjata, dan sampai kepada adanya gerakan-gerakan fundamental yang berupaya merubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Seperti ideologi Komunis dan Islam radikal.

Keadaan seperti itu terjadi akibat pembudayaan, pengamalan atau dengan kata lain aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila terhenti. Euforia reformasi salah satu faktor penyumbang utama terhadap tidak berjalannya

transformasi nilai-nilai ideologi Pancasila ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sebenarnya sudah serba berubah. Perubahan yang nyata terjadi, misalnya dari sistem demokrasi yang tidak langsung menjadi demokrasi langsung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, dari sistem pemerintahan sentralisasi kepada otonomi daerah, dari adanya pembatasan menjadi keterbukaan yang transparan, dan lain sebagainya. Perubahan begitu cepat terjadi, dapat diilustrasikan seperti “mengendari mobil dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak dukung oleh keketampilan yang cukup bagi pengemudi, tidak juga didukung oleh imprastruktur jalan dan jembatan bagus, maka sekali waktu mobil dapat berjalan keluar koridor dan terjadi kecelakaan”.

Perumpamaan pernyataan di atas, penulis korelasikan dengan keberadaan nilai-nilai Pancasila yang hampir ditinggal oleh bangsanya sendiri. Aktivitas yang mentransofmasi pembelajaran pendidikan moral Pancasila yang dilakukan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan, dalam rangka membekali bangsa Indonesia dengan pemahaman pengetahuan, sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sudah ditiadakan. Mata Pelajaran Moral Pancasila, sejak reformasi di sekolah-sekolah sudah ditiadakan dan tidak dipelajari lagi. Ironinya belum ada penggantinya yang ekwivalesi dengan bobot seharusnya untuk pembelajaran pendidikan moral Pancasila.

Pembelajaran pendidikan moral Pancasila di luar sekolah, baik dimasyarakat dan ditempat-tempat bekerja, yang dulu dilakukan dengan metode, teknik dan pendekatan Penataran Pancasila : Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dihilangkan dan ditinggalkan. Sebab dianggap sebagai warisan Pemerintah Orde Baru, yang *nota bene* ada anggapan dari kaum reformis bertentangan dengan semangat reformasi. Sehingga bangsa Indonesia hampir-hampir kehilangan oreitnasi tentang nilai-nilai ideologi Pancasila. Kebanyakan anak muda yang masih belajar di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi dan bahkan ada beberapa pejabat publik yang tidak hapal urutan sila-sila Pancasila. Jika diminta untuk menyebutkan silanya saja tidak hapal, apa lagi mau mengaktualisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila secara individu dan kebersamaan, inilah permasalahan besar dan tantangan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam meperkuat ketahanan nasional bidang ideologi Pancasila.

Memahami kondisi seperti itu, pemerintah bertekad untuk melakukan revolusi mental, terutama mengembalikan keyakinan dan pemahaman bangsa Indomesia, yang sudah hampir gagal paham terhadap nilai-nilai idelogi Pancasila. Yaitu *pertama*, mengutakan pendidikan karakter bangsa melalui pendidikan bela negara yang dikomandoi oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indoesia, *kedua*, pemberdayaan

revolusi mental yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, dan *ketiga*, pemantapan dan pembeinaan ideologi bangsa dengan mendirikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), dan sejak tahun 2018 berubah menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

Menurut *e-book* Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, permasalahan yang dihadapi sekaligus menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ada sebanyak 8 masalah (Ristek-Dikti. 2016 : 14-20), yang penulis kutif secara utuh adalah (1) masalah kesadaran perpajakan, (2) masalah korupsi, (3) masalah lingkungan, (4) masalah disintegrasi bangsa, (5) masalah degradasi moral, (6) masalah narkoba, (7) masalah penegakkan hukum yang berkeadilan, dan (8) masalah terorisme.

1. Masalah Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016, sebesar 74,6 % penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/ instansi/perusahaan/dan lain-lain) yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

2. Masalah Korupsi

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. *Transparency Internasional* (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata

peribahasa, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.

3. Masalah Lingkungan

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan, yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila.

4. Masalah Disintegrasi Bangsa

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3).

5. Masalah Dekadensi Moral

Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat? Bagaimana caranya meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif? Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi Anda?

6. Masalah Narkoba

Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis, dilihat dari kaca mata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI hanya

sebanyak 26.561 kasus narkoba Bukankah hal ini mengancam generasi penerus bangsa? Apakah Anda tidak merasa prihatin terhadap peningkatan jumlah korban narkoba tersebut?

7. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

8. Masalah Terorisme

Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama.

TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perlu penulis masukkan, satu lagi tantangan yang sangat serius dan tidak bisa dihindarkan adalah revolusi Industri 4.0 sebagai revolusi dunia teknologi informasi dan komunikasi. Memasuki revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, dunia pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sangat signifikan dan fundamental. Hal ini menurut

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir (Ristekdikti. 2018 : 10) sebagai akibat adanya pengaruh dari *digital disruption*, yaitu disrupsi inovasi dan disrupsi teknologi. Semua aktivitas menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan data yang juga tidak terbatas (*unlimited*). Pengaruh ini terjadi karena cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah membawa dampak begitu besar dalam kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk secara khusus terhadap adanya disrupsi pembelajaran pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

Menurut Patdomo Suwignjo. (Ristekdikti. 2018 : 12) penyebab perbuahan itu dikarenakan oleh adanya *internet of things*, *virtual reality* dan *artificial intelligent*. Keberadaan pendidikan tinggi di era disrupsi teknologi ini menyebabkan praktek pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sangat dahsah. Jika dulu pendidikan tinggi dilakukan secara *face to face* atau tatap muka, sekarang dan ke depan dengan pengaruh dan bantuan disrupsi teknologi proses pendidikan tidak perlu lagi bertatap muka tetapi secara *online*. Misalkan kampus Universitas Terbuka (UT) di Indonesia, pada 20 tahun yang lalu masih mencetak materi pembelajaran atau modul untuk mahasiswa. Tetapi dengan adanya manajemen pendidikan menggunakan sistem *online* maka materi pembelajaran yang dulu di cetak dalam bentuk buku (*hard copy*) diubah ke dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), sehingga materi pembelajaran dapat dengan mudah diakses secara *online*.

Sejalan dengan adanya pergeseran manajemen pendidikan, dari yang selama ini lebih banyak dilakukan secara konvensional tatap muka (*face to face*), kepada manajemen pendidikan program dalam jaringan (Daring) *e-learning* atau *cyber university* melalui perkuliahan sistem *online*. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan melakukan sejumlah langkah untuk mengambil kebijakan perubahan kelembagaan manajemen pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu pertama, mengingatkan kepada perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) bahwa kedepannya keberadaan pendidikan tinggi bukan hanya pada tatap muka belaka, tetapi lebih berorientasi pada sistem *online*. Kedua, Kementerian membuat peraturan perubahan tentang Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) untuk diperbaiki dengan memasukkan konsep *e-learning* atau *cyber university* perkuliahan *online*.

Pada saat ini, selain Universitas Terbuka dan ada beberapa perguruan Tinggi di Indonesia yang telah menerapkan manajemen pendidikan program *e-learning* atau *cyber university* perkuliahan *online* berbasis teknologi informasi internet, baik pada perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Tercatat sejumlah 57 perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta yang sedang

dan telah mendapat izin menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh (Ristekdikti. 2018 : 13). Manajemen pendidikan PPJJ atau *e-learning-cyber university* yang diterapkan melalui sistem *online* ini, tidak berarti hanya sekedar meng-*online*-kan materi paparan perkuliahan, tetapi manajemen pembelajaran harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Prinsipnya manajemen pendidikan program *e-learning* atau *cyber university* dengan sistem perkuliahan *online* dan tatap muka (konvensional) berbeda. Dalam sistem perkuliahan *online*, jumlah dosen tidak perlu banyak, namun jumlah mahasiswa bisa lebih banyak dari sistem tatap muka. Tetapi untuk program studi tertentu dibutuhkan banyak laboratorium dalam rangka menjamin kualitas akademik pembelajaran. Sehingga *internal quality management* sebagai alat kontrol dapat berfungsi dengan baik dalam menjamin kampus tetap berkualitas baik.

Universitas Indonesia, sejak tahun 2000 telah menerapkan manajemen pendidikan Program Pembelajaran Jarak Jauh, atau *e-learning* atau *cyber university*. Muhammad Anis (Ristekdikti. 2018 : 17) mengungkapkan bahwa manajemen pembelajaran sistem *online* bukan sekedar proses transfer materi dari dosen kepada mahasiswa. Dalam praktiknya PPJJ atau *e-learning* atau *cyber university* tidak boleh mengabaikan unsur pedagogik serta unsur keberadaan interaksi antar dosen dan mahasiswa yang bertumpuh pada sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan *e-learning* atau *cyber university*, yang dalam konteks ini adalah program pendidikan jarak jauh sistem *online*. Agar kualitas akademik kampus *cyber university* tetap berkualitas baik, maka Universitas Indonesia baru menyelenggarakan manajemen pendidikan PPJJ secara penuh di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Magister Teknologi Informasi (MTI). Sedangkan pada fakultas dan program pascasarjana yang lain masih mengkombinasikan manajemen pembelajaran konvensional dan *online*. Rata-rata Universitas Indonesia, membuka 10 % mata kuliah dari setiap program studi yang ditawarkan kepada mahasiswa untuk kelas *online*.

Hasil wawancara penulis dengan Rektor Universitas Esa Unggul, Arief Kusuma Among Praja (2108) dan pengalaman penulis sebagai subjek dalam mengaplikasikan manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university*, mendapatkan banyak informasi berupa fakta, data dan ekspektasi serta prediksi penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh yang sangat bagus sistem *online*. Sejak tahun 2010 Universitas Esa Unggul Jakarta sudah menyelenggarakan manajemen pendidikan program *e-learning* atau *cyber university* dengan sistem pembelajaran *online*. Pada awalnya, manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university* masih menggunakan model 6

dan 8. Maksudnya 6 kali *online* dan 8 kali tatap muka (*face to face*) yang bersifat konvensional, dalam 14 kali pertemuan pembelajaran selama satu semester.

Manajemen pembelajaran pada model ini masih bercirikan meng-*online*-kan sebagian bahan paparan perkuliahan, atau mentrasfer sebagian materi dari dosen kepada mahasiswa. Mulai tahun akademik 2018/2019 Universitas Esa Unggul sudah menyelenggarakan secara penuh (*full*) manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university* sistem *online* untuk kelas-kelas karyawan (paralel) pada program studi Kesehatan Masyarakat dan program studi Komunikasi dengan sistem *online*. Manajemen pembelajaran program *e-learning* atau *cyber university* penuh adalah menganut model 11 dan 3, artinya 11 kali perkuliahan dengan manajemen pembelajaran sistem *online* dan 3 tatap muka. Pertemuan tatap muka dilaksanakan pada pertemuan pertama untuk pengantar perkuliahan dan pengenalan, pertemuan ketujuh persiapan mengikuti ujian tengah semester (UTS) dan pertemuan keempat belas persiapan mengikuti ujian akhir semester (UAS).

Dengan demikian, pembelajaran pendidikan Pancasila, sebagai salah satu mata kuliah wajib pada perguruan tinggi akan sangat tergantung pada pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet. Ini sebagai tantangan bagi mahasiswa untuk dapat belajar sambil bekerja (*learning by doing*), sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tempat kerja dan di lingkungan dimana anda berada.

TANTANGAN MANUSIA INDONESIA MENURUT PERSEPSI BANGSANYA SENDIRI

Sebagai bahan pengayaan pengetahuan dan untuk menambah wawasan tentang tantangan dan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia dalam hal penerapan nilai-nilai Pancasila, dapat anda baca dalam artikel hasil penelitian dibawah ini, yang diterbitkan dalam bentuk Proseding IconSHEL terindeks Scopus, 2018. Penelitian bertujuan membuktikan teori Muchtar Lubis yang pernah disampaikan dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki tahun 1977, tentang enam karakter manusia Indonesia yaitu munafik, percaya takyahul, enggan bertanggung jawab, bermental feodal, artistik dan berwatak lemah. Teorinya ini di tulis dalam buku yang berjudul “Manusia Indonesia Sebuah Pertanggung Jawaban”. Salah satu bentuk luaran penelitian adalah artikel ilmiah berjudul “Manusia Indonesia Menurut Persepsi Bangsaanya Sendiri (*Indonesian*

People According to Their Nation's Perception)" yang telah disajikan (*call for paper*) dalam Seminar Internasional tanggal 5 dan 6 September 2018 di Padang dalam acara *International Conference on Social, Humanities, Economic and Law (IconSHEL)*.

Indonesian people according to their nation's perception

Syamsu Ridhuan
Faculty of Health
Esa Unggul University
Jakarta Indonesia
syamsu@esaunggul.ac.id

Abstract

This paper is taken from the results of research : Indonesian People: Studies of Ethnography on State Defence, Social Conflict and Community Development. The Purpose of testing the theory of Mughtar Lubis, which revealed four decades ago that Indonesian human has six characters : hypocritical, reluctant to be responsible for his action, feudal, believing in superstition, artistic and weak character. Design of qualitative research with ethnographic approach. To deeply studies the perceptions, attitudes, culture, beliefs and values or norms of Indonesian human. The location in the Taman Mini Indonesia Indah (TMII), sample 33 custom home of provinces represent ethnic, plus ethnic Betawi and four ethnic descent : Tionghoa, Europe, India, Arabia in the area of DKI Jakarta. Research results corroborate the theory of Mughtar Lubis. Six human characters of Indonesia are still relevant today. Obtained an accurate opinion, most of the respondents stated agree is still relevant to socio-culture, political and economic conditions even ideology in the state of Indonesia.

Keywords : hypocritical, lubis, ethnic

A. Introduction

The embryo of this article is come from the results of the research with the title : "Indonesian People : Studies of Ethnography on State Defence, Social Conflict and Community Development". A study aimed at testing the theory of MughtarLubis (2001) for decades ago, precisely on April 6, 1977 presented in a cultural speech entitled : "Reveals Six Human Nature of Indonesia" In Taman Ismail Maruzi (TIM) of Jakarta. This theory has been published in his book entitled : "Human Of Indonesian, An Accountability," published by the Obor foundation of Indonesia.

Explicitly Mochtar Lubis identifies six human characters of Indonesian, as follows : hypocritical, reluctant to be responsible for his action, feudal, believing in superstition, artistic and weak character (Lubis. 2001 : 4). This thought inspired the author to dig deeper by conducting research to examine the truth of this theory. Especially by asking what questions are still relevant to the lives of Indonesians who have lived in the melinial age and are considered to have made rapid advances in the field of science and technology.

This interest of the writer, because of the background by there is a paradoxical condition between the lifestyle of the Indonesian nation who prefer to be called as a person who

is democratic, reformist, and religious, with objective conditions that the author observes from various activities monitored through the publication of television media, social media, online media and other national media. Where the lunge of the Indonesian nation, either individually or in groups within the organization and/or a of the Indonesian nation, either individually or in groups within the organization and/or a particular institution, there are often inconsistent, insecure and inconsistent visions of Pancasila norms as guideline for community life in the country of Indonesia (Ridhuan. 2015).

B. Method

1. Research Design

In testing the theory, researchers used qualitative research design with ethnographic approach (Soegyiono. 2013 and Moelong. 2007). An in-depth assessment of the natural behaviors associated with perceptions, attitudes, cultures, beliefs and values or norms of the Indonesian human community. The research location in Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 33 samples of traditional house every provinces in Indonesia as well as n new represent ethnic, plus ethnic Betawi and 4 (four) ethnic descendants namely Tionghoa, Arab, India and Europeans who live in DKI Jakarta.

Extracting data and information using questionnaires and in-depth interview guidelines to obtain responses and assumptions from respondents from 34 provinces in Indonesia, as representation of the ethnicities of the provinces they represent and they live in the DKI Jakarta and its surroundings. Coupled with ethnic immigrants or ethnic Chinese ethnicity, Europe, India and Arab who have become citizens of Indonesia. Data and information are analyzed qualitatively to draw conclusions of the theory test. Besides testing the theory, the authors also conducted an analysis of the existence of human behavior relations Indonesia seen from the perspective of state defence, social conflict and human development. More firmly these three perspectives are conceived as follows : (1) the context of defending the country conceptualized as the loyalty and love of citizens to the homeland of Indonesia, the nation and the country of Indonesia (Ridhuan. 2106), (2) social conflict is conceived as a condition of conflict between ethnic (horizontal) cause of division, and opposition to a ruler or government (vertical) creates a crisis of confidence, and (3) human development is connected as making people smart, emotionally and spiritually intelligent, get a decent and happy income

2. Operational Definition

From the problematic of the gap between the desire to become the ideal human figure of democratic, reformist and religious society with the reality, visible from the appearance of "lunge" in the activities of daily life and the behavior has been published by the national media. Then the author tries to dig information and at the same time prove the truth of Mochtar Lubis theory about six characters owned by human Indonesia, is still relevant today. In addition to examining the truth of the six human characters of Indonesia in contemporary context, is also analyzed in relation to the perspective of state defense, social conflict and human development.

The six human character of Indonesia is six characters : hypocritical, reluctant to be responsible for his action, feudal, believing in superstition, artistic and weak character. Conceptually is meant by human Indonesia in the category of hypocrite is a group of people who if promised, he disbelieved; when given the trust, he betrayed; and when he spoke, he lied. For humans who fall into the category of reluctantly responsible for his actions is a group of Indonesian human who only dare to do but not able to take risks and only want to get right but ignore the obligation. Category of Indonesian human who still believe in superstition is a group of people who actually believe in God, but also believe in order than God.

While the Indonesian human who still feudal is a group of people who behave sycophants and do the origin of the father happy. Indonesians who are the artistic category are those who have creativity and are happy with the beauty. In the end the Indonesian human who fall into the category of Indonesian people who do not have a strong position.

C. Research Finding

Strengthen the Theory of Mochtar Lubis.

The research findings conclude corroborate the theory of Muchtar Lubis about six human characters of Indonesia as follows, hypocritical, reluctant to be responsible for his action, feudal, believing in superstition, artistic and weak character. When analyzed through scientific research procedures, obtained accurate results justify hypothesis testing reinforces the theory of Muchtar Lubis.

Although it has been running for four decades more, was still very relevant to the objective conditions of human life Indonesia today. This fact provides a justification for the existence of Indonesia human in the social, cultural, economics and even ideology in the couns and even ideology in the country of Indonesia.

Discussion

1. Hypocritical

The result of processing and analysis of data and information from the questionnaire instrument obtained a very interesting fact as many as 35 people from 50 respondents or 70 % of respondents agreed that Indonesia human is still a hypocritical character. This fact is corroborated by the results of the interviewer provide a statement that in certain professions the hypocritical character of Indonesian human is still very thick. The professions mentioned by the respondents are mostly those who work and work as politicians and public officials. More details are expressed by the research respondents that who include the profession of politicians and public officials are member and/or administrators of Political Parties, House of Representatives, Regional Representatives Council, Regional People's Legislative Assembly, the Head of the Region and the Deputy Head of the Region, directly elected.

The respondents were inspired by listening to the news, presented by TV, reading news on internet site and the web that was launched by social media, magazine.com, and print media, listen to radio news and other electronic media. They pay attention to the "lunge" the politicians and regional heads who work are not in accordance with promise, vision, and mission at the time of the campaign. In general after "sitting" in the chair of office they lie, broken promises and not trust.

Indicators that becomes benchmarks strengthen the character of hypocrisy are many politicians, members of House of Representatives, Regional Representatives Council, Regional People's Legislative Assembly, the Head of the Region and the Deputy Head of the Region, who do collusion, corruption and go to jail. Just to remind that at the time of the campaigns these individuals rambled on with oaths and promises, with something like this : If later elected as an official "this, or that....." then I am ready to combat corruption. I instruct all the ranks of the National Civil Service to the local government which is led to sign the facts of integrity against corruption, collusion and nepotism. But in fact what happened was the head of a promised area who committed collusion, corruption and nepotism end up to jail.

Another indicator that reinforces the hypocrisy of members House of Representatives, Regional Representatives Council, Regional People's Legislative Assembly, the Head of the Region and the Deputy Head of the Region, base on data and information processed from interviews with research subjects. Obtained facts in the form of statement often expressed by unscrupulous members of House of Representatives, and Regional People's Legislative Assembly, when discussing local revenue and expenditure budgets, and state budget of revenues and expenditures, as if to be critical in in order for the budget to be as optimal as possible for the people as a fee of use to the state.

But the fact that they are fighting for themselves, among other things how to generate and raise member's income House of Representatives, and Regional People's Legislative Assembly, by increasing the amount of personal benefits of members and ask for luxurious amenities. Than the budget approval usually does not escape from bargaining the person members of House of Representatives, and Regional People's Legislative Assembly, which will be profitable, new deal authorized Local Revenue and Expenditure Budgets, and/or State Budget of Revenues and Expenditures. As well as to enact legislations, also did not escape from bargaining and transactions, minimum pledge to benefit the person members of House of Representatives, and Regional People's Legislative Assembly, new deal and regulation passed.

2. Reluctant To Be Responsible For His Action

As in the research findings on hypocritical character, the result of processing and analysis of data and information from the questionnaire instrument, obtained a very interesting fact. As many as 32 people from 50 respondents or 64 % of respondents agree that Indonesian people are still spirited reluctantly to be responsible for his action. Terminology of people who are considered included in this category are people who only dare to do but afraid to do but afraid to take risks. Just want to get right but ignore the obligation.

Of the interviews obtained a corroborating fact that generally people who are considered to be categorized as reluctant to be responsible for their own actions, come from almost all walks of life and spread in various occupational professions. Except those who have strong faith and piety, high morality and commitment to obligation. Character who are reluctant to be responsible for their own actions, can be seen in every community, for example against unscrupulous State Civilians prefer to demand the honorarium and salary, and are reluctant to perform the obligations of doing the tasks that are the responsibility.

Against rogue criminals and residivists, among others : crimes of murder, robbery, sexual crimes: crimes of murder, robbery, sexual crimes, bully and so on that leads to crime. In general the person does not want to admit to the came of his actions, as far as possible to avoid, run and eliminate personal identity.

3. Believing In Superstition

The results of processing and analysis of data and information from the questionnaire instrument, obtained a very surprising fact. As many as 37 people from 50 respondent or 74 % agree that Indonesia people still believe in superstition. Terminology of people who are considered included in this category are those who believe in God, but also believe in other than God.

From the interviews obtained reinforce results, that generally people who are considered into the category still believe in superstition is the Indonesian people who consider there are still magical powers that can help to get out of the complicated problems faced in life in the word. From in-depth interviews obtained information that there are some superstitious believers praying to the statues. According to them in the statues there are spirits that can help to blow his prayer. This person actually adheres to a particular religion but is not sure when pryaing to his god that his prayers to a particular religion but is not sure when pryaing to his god that his prayers and requests will be granted. And the end they prayed and asked help on a man-made sculpture instead of pryaing and asking God Almighty.

There is also a claim that if someone wants to live rich, a lot of money and wealth abundant, business smoothly, fast mate can be, that have to ask *shaman* in volcano of Kidul, commonly referred to as *wealth*. But this way has a risk of casualties from the family side *wealth*, because the spirits of *wealth* ask for a reward in the from of soul, blood ora anything that belongs to the biliever's favorite *wealth*.

As well as those who want to be successful in career, quickly get married, get high position and loved by superiors, then they have to do mythic ritual and willing to bathe at midnight in West Java rivers with carrying obligation of workship. To the river, to the aid and to the apparitions of Jinns, Demons resembling certain beings, such as the shy, beautiful, and tall human beings. They workshipped and sought help for the appearances to be blessed.

4. Artistic In A Creative Sense

The results of processing and analysis of data and information from the questionnaire instrument, obtained the fact are extraordinary. As many as 40 people from 50 respondents or 80 % respondents agree that Indonesia people are artistic in a creative sense. The terminology of the group of people falling into this category is people who have a creative soul and are happy with the beauty.

There are the people of Indonesia have a hobby of smearing objects of art, whether derived from the help of nature, the woods of the forest, the sculptures and the skins of animals that have been fermented tangibles the original form. Indonesia people are also many skilled at making good creations and artistic spirits. So as to create object of high value in the beauty of art and certainly valuable enough expensive.

In line with the above statements, Indonesian people are also happy with the beauty. Appreciation of the people of Indonesia to the beauty of nature makes a lot of inspiration to work. Creativity like this that encourages people's productivity in creating goods, object or the natural environment with high aesthetic value. To the nature environment it must be admitted that nature in Indonesia general has beautiful scenery, and has a myriad of potential that can be processed into innovative and productive goods for the needs of everyday life.

5. Weak Character

As many as 28 people from 50 respondents or 56 % of respondents agreed that Indonesian people have a weak character. The terminology of the person who is considered to belong to this category is for the person who has no principles and non strong stance in his life. Half more respondents gave the reponse that Indonesians are still weak, have not principles and stances are not strong in carrying out life.

The factors that trigger it are largely dependent on the quality of human resources education, the state of the economy and the ability to adapt to the development of science, technology and globalization. In a society with a high level of education, but obtains an academic degree by using mentalities of graffiti, formalities, diplomas and academic value purchased in transactional, in other words not on his own merit. It is certain that such a society will still have a weak character, not strong character, no principles and no strong stance.

In the low middle class society, especially for people who are below the poverty line. There are many social vulnerabilities that make them not strong, even have almost no principles to set direction for a better life. Often people under the poverty line are subjected to influences in order to follow who influence. For example at the election democracy party election event, they despite the intention to choose someone, but because of economic pressure the influence of money politics and to get the many, then they are willing to choose a non-conscience choice. In other words, they decided to choose one of the candidates for the region because under the influence of money pressure. In other cases, there are people who convert and believe, because they are promised money and necessities of life. Then they are willing to change religion and belief.

People who have no principles, no strong or weak-minded stance, are largely incapable of adapting to the advance of science, technology and globalization. The result of not being able to master science and technology makes them a technological stammer, unable to compete to make better, earn a decent and prosperous income, They tend to stagnate, increasingly retreat and stop. The causes are what make them have a weak character, no stance and no strong principles of life.

6. Feudal

There were 31 people from 50 respondent or 62 % of respondent agree to state that Indonesian people are still feudal. The terminology of the people included in this category is the person who behaves the sycophant and act as long as you are happy. Indonesia nation has been colonized by the Dutch long enough and last occupied by Japan. Due to the duration of the colonialism, it shaped the mentality of the Indonesian nation into feudal mentality, which is an attitude and actions that tend to please the invaders with the reward or origin is not hurt and given protection. Mentality like this is still there and have made in daily life among the nation of Indonesia. Mentality like this commonly known by the mentality of the origin of the father happy Koentjaraningrat. 2015).

Phenomenon of mentalities of the father happy like many infected among bureaucracy, government apparatus in the rank of State Civilian Apparatus. The servants of the state sometimes unconsciously work only to make the leaders happy, so often override professionalism and proportionality in work. Other impacts that also as a form of feudal mentality is the habit of bribing, bribes to superiors or to others who play the role of work to be smooth, even done to get rewarded certain project. These bribes to bribes occur throughout the field of work. The context is sometimes refined as a form of greeting received love then give a bribe. There are even more vulgar, bribe deliberately done to be accepted into civil servants, up the job and to get a certain job in the form of project bidding.

G. Conclusion

The results of study conclude corroborate Muchtar Lubis theory which six Indonesian human character : hypocritical, reluctant to be responsible for his action, feudal, believing in superstition, artistic and weak character. Although it has been running for four decades Mochtar Lubis theory is still very relevant to the condition of human life of Indonesia today. This fact justifies the existence of Indonesia people in the social, cultural, political and economic dynamics, even the ideology of Indonesian state.

That Indonesians can not be separated from hypocrisy attitudes and behavior : when speaking, lying; if given a trust, lie; and when promised, disbelieve. There are still many Indonesians who are reluctant to take responsibility for their actions: dare to do but not want to take responsibility, the only action is not get the right but ignore the obligation. Still feastal mentality in almost every profession: work from the father happy, bribes to superiors to get the job, bribery leadership to win project bidding job is commn. There are many Indonesians who still believe in superstition: the gods in getting wealth, making money in business, asking for a position and finding a mate. Many Indonesians in the creative sense produce productive goods and love the beauty of nature or objects that are created to be beautiful. And the end there are still many Indonesian people have a weak character, do not have a strong position and do not have a firm principle ini making choice.

References

- [1] Lubis, Mochtar. 2001. *Indonesian People An Accountability*. Jakarta : Indonesian Obor Foundation.
- [2] Ridhuan. Syamsu. 2015. *The Main Idea of The National Defense Intelligent Policy*. Paper presented in The Discussion of State Defense in The Directorate General in The Defense Potential of The Indonesiaa Republic's Defense Ministry. Jakarta. July, 2015.. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- [3] Moleong, J Lexy. 2007. *Method of Qualitative Research Revised Edition*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- [4] Sugiyono. 2013. *Educational Research Approach Qualitative, Quantitative and R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [5] Ridhuan. Syamsu. 2016. *Intelligent Defending State : Civic Education and Pancasila*. Jakarta : NFA.
- [6] Koentjaraningrat. 2015. *Interductional to Anthropology*. Jakarta : Rineka Cipta

DAFTAR PUSTAKA

Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.

Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.

Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Setjen Kemenristekdikti. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.

Suwarno, P.J., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.

Syahrial Syarbaini, 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.

-----, 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.